



## BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

---

### **7.1 Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019**

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah :

***“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”***

Dalam rangka mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

#### **7.1.1 Strategi Pembangunan Nasional**

Untuk mendukung agenda tersebut, diatas maka secara umum Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam yang menggariskan hal-hal sebagai berikut :

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut :
  - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

- b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah - bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
  - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan;
- a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil resiko, pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.
  - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas :
    - ) Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
    - ) Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumberdaya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
    - ) Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan

kesejahteraan rakyat.

) Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat diseluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/ memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas :

) Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal didesa;

) Wilayah pinggiran;

) Luar Jawa;

) Kawasan Timur.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi tersebut antara lain :

a. Kepastian dan penegakan hukum;

b. Keamanan dan ketertiban;

c. Politik dan demokrasi; dan

d. Tata kelola dan reformasi birokrasi.

4. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output.

Cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

### **7.1.2 Prioritas Pembangunan Nasional**

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 9 (Sembilan) agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

### **7.1.3 Arah dan Tema Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara**

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Nusa Tenggara, maka tema besar Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara sebagai :

- Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition* (MICE);
- Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut;
- Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung;
- Pengembangan industri mangan, dan tembaga.

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015-2019 dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:

- (a) pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga.
- (b) penyediaan infrastruktur wilayah.
- (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Nusa Tenggara, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan Ekonomi Khusus dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.
2. Sementara itu, untuk mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 20 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 5,90 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 15,62 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar rata-rata 68,98.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Nusa Tenggara, maka akan diusulkan pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang berperan sebagai PKN dan optimalisasi 1 kota sedang sebagai *buffer* urbanisasi.
4. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan pengangguran di desa-desa tertinggal dan mempercepat pembangunan ekonomi menuju desa mandiri.
5. Meningkatkan keterkaitan desa- kota, dengan memperkuat sedikitnya 5 (lima) pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 3

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.

7. Sasaran Otonomi Daerah untuk Wilayah Nusa Tenggara adalah : (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 30 persen untuk propinsi dan 10 persen untuk kabupaten/ kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 25 persen dan untuk Kabupaten/ Kota sebesar 25 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 provinsi dan 20 kabupaten/ kota di wilayah Nusa Tenggara; (4) Terlaksananya *e-budgeting* di wilayah Nusa Tenggara (dengan proyek awal Provinsi NTT); (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50 persen dan S2-S3 sebesar 5 persen; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Nusa Tenggara sebesar 30 angkatan; (7) Terlaksananya pengaturan kewenangan secara bertahap di wilayah Nusa Tenggara (dengan proyek awal Provinsi NTB); (8) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (9) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100 persen; (10) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 100 persen; (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Nusa Tenggara.
8. Sasaran Penanggulangan Bencana di Wilayah Nusa Tenggara adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 15 kabupaten/ kota sasaran (Kota Mataram, Kota Kupang, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Bima, Ngada, Ende, Sikka, Manggarai, Alor dan Belu) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK maupun kawasan pusat pertumbuhan lainnya. Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada

akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDB Wilayah Nusa Tenggara terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 1,27% (2013) menjadi 1,31% (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara.

## **7.2 Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018**

Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah:

**Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera.** Visi pembangunan tersebut mengandung 4 kata kunci, yakni :

1. **Masyarakat NTB**, artinya seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di wilayah Nusa Tenggara Barat.
2. **Beriman**, artinya masyarakat yang taat beragama, berbudi pekerti luhur dan saling menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial budaya.
3. **Berbudaya**, artinya masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
4. **Berdayasaing**, artinya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global.
5. **Sejahtera**, artinya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan.

Dalam rangka implementasi Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi pembangunan, yakni :

### **1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter**

Keberhasilan pembangunan dipengaruhi pula oleh seberapa besar kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Sumberdaya manusia yang berkualitas bukan saja dibentuk oleh kapasitas intelektual personal semata (*Intelektual Question/ IQ*), namun lebih juga dipengaruhi oleh kualitas moral/ budi pekerti atau sering dinamakan *Spiritual Question/ SQ*. Meletakkan pondasi budi pekerti/ moral masyarakat yang kokoh adalah modal dasar pembangunan bagi

kesejahteraan yang lebih baik. Hidup dalam atmosfer yang amat pluralitas secara sosial, budaya maupun agama memerlukan semangat dan komitmen yang kuat dalam toleransi dan kebersamaan, terlebih arus globalisasi telah menembus sekat-sekat geografis. lintas ruang dan waktu membuat masyarakat hidup dalam pergulatan sosial budaya yang bisa menggoyahkan jati diri. *Cultural shock* akan SDM yang memiliki kualitas spiritual dapat diantisipasi melalui pengembangan karakter masyarakat dengan membangun mental yang dilandasi nilai-nilai agama dan mengembangkan semangat toleransi/ harmonisasi dengan mengakui kebersamaan dalam keberagaman.

## **2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.**

NTB terdiri dari 3 etnis besar yakni : Sasak ,Sumbawa dan Mbojo dan beragam etnis lainnya. Aneka ragam suku bangsa yang hidup bersama-sama di wilayah Nusa Tenggara Barat tentu membawa adat istiadat, budaya dan berbagai nilai-nilai kearifan dalam kehidupan sehari-hari. Aset budaya dan kearifan lokal ini harus dikelola sebagai sebuah kekuatan dalam pembangunan daerah. Daerah harus maju, masyarakat harus maju namun tidak harus melupakan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki. Kemajuan harus bercirikan budaya dan kearifan lokal. Nilai budaya dan kearifan lokal yang telah lama ada ditengah-tengah masyarakat bila terus dipelihara, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari akan dapat memberi warna masyarakat yang khas/ unik. Pada tingkat selanjutnya keunikan budaya dan kearifan lokal ini menjadi aset wisata alternatif melengkapi pesona keindahan alam pantai dan pegunungan yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat.

## **3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.**

Setelah pondasi budi pekerti/akhlak mulia yang ditopang oleh perkuatan sendi budaya dan kearifan lokal, maka menghadirkan pemerintahan yang baik dan kuat adalah tahapan berikutnya dalam rangka merengkuh perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang kuat ditopang oleh birokrasi yang sehat, hukum yang ditegakkan, dan stabilitas keamanan bagi pembangunan. Reformasi birokrasi jalan menuju perkuatan hadirnya birokrasi yang kuat. Birokrasi ditempatkan sebagai institusi yang bersih dan melayani kepentingan



masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang lebih baik, kualitas perencanaan yang makin partisipatif, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi unsur birokrasi bersih dan melayani. Fasilitasi terhadap upaya penegakan hukum di daerah dan penciptaan rasa aman masyarakat, terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban modal dasar lainnya pembangunan dapat berjalan lancar dan baik.

#### **4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing**

Sumberdaya manusia yang berdaya saing adalah harapan semua pihak. Sumberdaya manusia yang berdaya saing harus sehat, cerdas, mampu memenuhi kebutuhan jasmani-rohani serta mampu memenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia tanpa mengabaikan keadilan gender. Kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, kesempatan memperoleh kehidupan yang layak menjadi fokus peningkatan mutu sumberdaya manusia daerah Nusa Tenggara Barat. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dengan memberdayakan posyandu, kaderisasi posyandu, mengembangkan motivator, meletakkan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya Generasi Emas NTB 2025, jaminan kesehatan pada masyarakat miskin yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan turunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan fokus bidang kesehatan. Pada bidang pendidikan perhatian terhadap pendidikan anak usia dini, melanjutkan wajib belajar 9 tahun, meletakkan pondasi yang kuat bagi pendidikan universal, pengembangan pendidikan kejuruan dan non formal, pendidikan luar biasa dengan titik tolak peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan. Disamping hal tersebut, perhatian kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak kalah pentingnya.

#### **5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah**

Pembangunan ekonomi berorientasi pada kemajuan ekonomi kerakyatan, mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal disamping kemajuan ekonomi skala besar berbasis potensi unggulan lokal. Menumbuhkembangkan usaha mikro kecil menengah, mengembangkan industri kecil dan menengah yang telah ada bagian penting memajukan ekonomi kerakyatan. Era industrialisasi berbasis

pertanian dimulai setelah 5 tahun sebelumnya fokus pada peningkatan produk bahan baku. Pembangunan industri olahan, peningkatan kualitas kemasan dan perluasan pasar produk SDA dan industri olahan harus menjadi prioritas. Peningkatan kapabilitas lembaga ekonomi, peningkatan kapasitas teknologi industri, peningkatan kualitas pelaku industri, peningkatan investasi daerah perlu dilakukan. Seluruh upaya tersebut diharapkan berkontribusi menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat guna menurunkan angka pengangguran.

**6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang.**

Pembangunan infrastruktur merupakan pendukung pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Sentra aktivitas ekonomi maupun kepentingan pembangunan sosial harus didukung oleh ketersediaan pelayanan infrastruktur. Upaya pembangunan infrastruktur 5 tahun terakhir telah menyediakan berbagai infrastruktur yang lebih baik, tinggal bagaimana memelihara dan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada untuk mengoptimalkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Fokus pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dan mengembangkan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur yang telah tersedia.

**7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan**

Memanfaatkan SDA dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan kehidupan yang baik. Daerah harus maju namun tetap juga harus lestari. Sebagai provinsi kepulauan yang masuk dalam kategori pulau-pulau kecil sekaligus daerah yang berada dalam *ring of fire* gunung berapi, perhatian terhadap ketersediaan, keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam harus dilakukan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dasar dalam mengalokasikan kegiatan pembangunan. Rehabilitasi hutan dan lahan, pelestarian keanekaragaman hayati, rehabilitasi dan konservasi daerah-daerah rawan bencana, upaya-upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam sekaligus menyiap siagakan masyarakat

bila terjadi bencana adalah hal pokok dalam upaya pematapan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan tersebut diatas, kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018.

Mencermati tabel kebijakan umum dan program prioritas 2013-2018, dirumuskan ada 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan tersebut, adalah:

1. Budipekerti Luhur
2. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Kesejahteraan Sosial
6. Agroindustri dan Ketahanan Pangan
7. Wirausaha dan Iklim Investasi
8. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
10. Lingkungan Hidup, Perubahan iklim dan Bencana Alam

### **7.3 Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021**

Pencapaian keadaan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam kurun waktu 20 tahun yang tetuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima 2005- 2025 yaitu dengan mewujudkan Kabupaten Bima yang maju, sejahtera, mandiri, bermartabat, dan religius, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maju dalam pertanian berkelanjutan, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut, merupakan hasil rumusan perencanaan strategis jangka panjang yang menjalin keterkaitan antara aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan.

Secara umum, keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang dituangkan dalam 5 (lima) Agenda Pembangunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kab. Bima 2005- 2025 Daerah dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Agenda Perwujudan Masyarakat Sejahtera dan Mandiri
2. Agenda Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
3. Agenda Pemerintahan Yang Baik
4. Agenda Pertanian Berkelanjutan
5. Agenda Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Berdasarkan agenda pembangunan jangka panjang, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan tersebut diatas, tertuang dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Bima 2016-2021, sebagaimana tabel 7.1.

**TABEL 7.1**  
**KETERPADUAN MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA					PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	
			Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020					Kondisi Akhir (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>MISI 1 : Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat</b>												
Meningkatnya kesadaran dan pemahaman kehidupan beragama	Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan	Indeks prestasi (Persentase Juara MTQ)	40	52	64	76	88	100	Program Peningkatan Potensi Keagamaan dan Sosial Budaya	<i>Peningkatan prestasi qori qoriah</i>	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
	Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat	Rasio jumlah dai dibagi jumlah penduduk	0,002	1,202	2,402	3,602	4,802	6,002	Peningkatan kualitas DAI	<i>Jumlah dai yang telah dibimtek dibagi total dai x100%</i>	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
									Peningkatan sarana dan prasarana TPQ	<i>jumlah tpq yang dibantu dibagi total tpq x 100%</i>	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
<b>Misi II : Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Tertib, dan Nyaman Dengan Mengedepankan Penegakan Supremasi Hukum</b>												
Menciptakan Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat	Meningkatkan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Hukum	Cakupan Penegakan Perda	65,00	72,00	79,00	86,00	95,00	100	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	<i>Rasio penanganan konflik tahun berjalan</i>	Ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibub & Linmas)	Bakesbangpolmas
										<i>% keterlibatan unsur masyarakat dalam pelaksanaan forum-forum ketertiban dan keamanan</i>		Bakesbangpolmas

										<i>dibandingkan dengan seluruh unsur atas forum tersebut</i>		
Berkembangnya kehidupan demokrasi dan politik yang sehat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatnya kualitas demokrasi dalam masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dan berpolitik	70	76	82	88	94	100	Program pengembangan wawasan kebangsaan	<i>% pelaksanaan peringatan hari nasional dibandingkan jumlah hari nasional</i>	Ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibub&Linmas)	Bakesbangpolmas
									Program pendidikan politik	<i>% LSM/Ormas yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah total LSM yang ada</i>	Ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibub&Linmas)	Bakesbangpolmas
Terwujudnya daerah yang tangguh bencana	Membangun masyarakat yang Tangguh terhadap bencana	% jumlah desa yang memiliki TSBD: jumlah desa	40	48	56	64	72	80	Program Pemulihan Bencana	<i>Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana</i>	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	BPBD
									Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat	<i>% partisipasi penduduk dalam TSBD: jumlah penduduk usia produktif</i>	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	BPBD
		Jumlah penduduk korban bencana										BPBD
		Luas wilayah terdampak bencana										BPBD

**MISI III : Meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.**

Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Presentase penduduk miskin semakin berkurang	15,78	14,72	13,66	12,60	11,54	10,47	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi pedesaan	<i>Jumlah pendapatan perkapita</i>	pemberdayaan masyarakat desa	Disperdag, Koperasi
		Presentase menurunnya angka pengangguran	4,72	4,38	4,04	3,70	3,36	3	Program peningkatan kesempatan kerja	<i>Angka pengangguran Tingkat penyerapan angkatan kerja</i>	Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah penempatan tenaga kerja/jumlah pencari kerja										
Meningkatkan kualitas Sarana dan prasarana wilayah sesuai arahan tata ruang	Meningkatnya kepatuhan terhadap arahan tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan Perda RTRW	46,75	57,40	68,05	78,70	89,35	100,00	Program pengendalian tata ruang	<i>Kepatuhan terhadap rekomendasi BKPRD</i>	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda, dan DPMPTSP
	Tersedianya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	34%	40,16	46,32	52,48	58,64	64,80	Program pembangunan jalan dan jembatan	<i>Rasio kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik(jalan baik/total panjang jalan)</i>	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Terpenuhinya kebutuhan air irigasi	Persentase jaringan irigasi yang terairi	43,00	52,40	61,80	71,22	80,62	90	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	<i>Cakupan daerah irigasi terlayani (Luas area/Ha)</i>	Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perkebunan
									Program pengembangan; pengelolaan; dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	<i>Persentase sumber air / mata air dalam kondisi baik / debit stabil</i>		
Tertatanya kawasan kumuh perkotaan dan pedesaan secara berkelanjutan	Luas kawasan kumuh (Ha)	961.21	858,968	756,726	654,484	552,242	450	Program pengembangan perumahan dan permukiman	<i>Persentase rumah layak huni</i>	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	
								Program pengembangan, penyehatan lingkungan	<i>Persentase rumah tangga berakses sanitasi</i>			

									permukiman			
									Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	<i>Rumah tangga terlayani air bersih</i>	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Tersedianya sistem pengelolaan persampahan yang komprehensif	Jumlah sampah yang dikelola (Ton/M <sup>3</sup> )	0,05	0,19	0,33	0,47	0,61	0,75	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	<i>Rasio tempat pembuangan sampah persatuan penduduk</i>	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	Rasio Ketaatan terhadap tata ruang (%)	80	82	84	86	98	90	Program Perencanaan Tata Ruang	<i>Jumlah Perda RTRW</i>	Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Terjaganya kualitas dan kuantitas mata air	Jumlah titik mata air	236	236	236	236	236	236		Jumlah titik mata air	Pengendalian Ruang	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersedianya pedoman pembangunan	Jumlah dokumen tata ruang yang disahkan/jumlah yang harusnya disusun (target 5 tahun)	3 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	9 dokumen		<i>Jumlah Perda RDTR</i>	Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tersedianya aksesibilitas masyarakat terhadap angkutan umum	Cakupan wilayah yang terlayani angkutan umum	81,68	85,34	89,00	92,66	96,32	100	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	<i>Persentase desa yang terlayani moda transportasi umum</i>	Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya aksesibilitas terhadap sarana telekomunikasi dan informasi	Cakupan desa yang terlayani jaringan telekomunikasi	80,63	84,50	88,37	92,24	96,11	100	Program Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	<i>Rasio desa terjangkau jaringan telekomunikasi dan informasi</i>	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Meningkatnya Investasi, produktivitas dan daya saing usaha kecil dan menengah	Terwujudnya peningkatan Investasi dan nilai produksi di daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Daerah	5,73	5,82	5,91	6,02	6,12	6,20	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	<i>Jumlah investor yang melakukan kontrak : total investor mendaftarkan</i>	Penanaman Modal	DPMTSP, Bag. Ekonomi



menuju kemandirian ekonomi daerah									Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Lama proses perijinan investasi		
									Program penguatan kelembagaan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu	Jumlah SDM yang memenuhi standar		
		Persentase nilai investasi (PMDN/PMA)	3,00	3,50	3,95	4,30	4,70	5,00	Program peningkatan produksi	Peningkatan jumlah produksi tanaman pangan	Ekonomi	DPP & Dinas Peternakan
										Peningkatan jumlah produksi hortikultura		
										Peningkatan jumlah produksi perkebunan	Ekonomi	Diinas Pertanian dan Perkebunan
									Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan jumlah IKM yang dibina	Ekonomi	Disperindag
									Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan IKM yang terfasilitasi dalam mendapatkan sertifikasi	Ekonomi	Disperindag
	Peningkatan kemampuan fiskal daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	6,67	7,34	8,01	8,68	9,35	10,00	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	Keuangan	BPPKAD
									Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM	Jumlah produk yang distandarisasi	Ekonomi	Koperasi UMKM
	Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM	Peningkatan usaha mikro menjadi kecil, dan peningkatan usaha kecil menjadi menengah	42	6	6	6	6	6	Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif	Peningkatan usaha mikro menjadi kecil	Ekonomi	Disperidag
			7	2	2	2	2	2	Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	Peningkatan usaha kecil menjadi menengah	Ekonomi	Koperasi UMKM

	Terjaganya ketersediaan dan cadangan pangan	Rata-rata cadangan pangan (ton)	65,681	73701	81720	89740	97759	105,779	Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	<i>Skor pola pangan harapan</i>	Pertanian, Ketahanan Pangan, Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, DPP	
										Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	<i>Meningkatnya nilai tukar petani</i>	Pertanian, Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, DPP
										Program peningkatan produksi hasil peternakan	<i>Jumlah Produksi Pertanian (peternakan)</i>	Pertanian, Ketahanan Pangan, Pangan	Dinas Peternakan
										Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan	<i>Peningkatan jumlah produksi perkebunan</i>	Pertanian & Ketahanan Pangan	Dinas pertanian, Perkebunan dan DKP
		Jumlah produksi kelautan dan perikanan (Tangkap/ Budidaya/ Garam) (Ton)	150.581	153715,6	156850,2	159984,8	163119,4	166.254	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	<i>Jumlah produksi kelautan dan perikanan</i>	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			50.179	51.223,8	52.268,6	53.313,4	54.358,2	55.403	Program peningkatan produksi perikanan tangkap	<i>Jumlah produksi perikanan tangkap terhadap total produksi perikanan</i>			
			152.739	171.388	190.038	208.688	227.338	245.988	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	<i>Jumlah produksi Garam</i>			
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	0,31	1,25	2,19	3,12	4,06	5,00	Program pengembangan destinasi pariwisata	<i>Rasio jumlah destinasi yang menjadi objek</i>	Pariwisata	Dinas Pariwisata	
									Program pengembangan pemasaran pariwisata	<i>Rasio jumlah destinasi yang dipasarkan</i>	Pariwisata	Dinas Pariwisata	

**MISI IV : Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah Dengan Mengedepankan Rasa Tanggungjawab Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Meningkatnya kualitas, efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang prima	Terciptanya pelayanan publik yang profesional	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemberi pelayanan langsung	0	20	40	60	80	100	Program Penataan Administrasi Kependudukan	<i>Prosentase Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Catatan Sipil</i>	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
--	---	---	---	----	----	----	----	-----	--	--	--	---

		kepada masyarakat yang melakukan survey kepuasan (%)											
										Program peningkatan pelayanan kesehatan	<i>Indeks kepuasan masyarakat</i>	Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah
										Program peningkatan pelayanan perijinan	Indeks kepuasan Masyarakat (perijinan)	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Tterpadu Satu Pintu
										Program Peningkatan Keswan dan Kesmavet	Peningkatan jumlah ternak yang divaksin	Pertanian	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
										Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	Peningkatan frekuensi/ jumlah penyuluhan dalam pendampingan petani/kegiatan pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Terciptanya sistem birokrasi yang profesional dan berkualitas	Maturitas Sistim Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<i>Persentase SK administrasi kepegawaian terbit tepat waktu</i>	Kepegawaian dan Diklat	BKD
										<i>Persentase aparatur yang berkompeten</i>			
										Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	<i>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang aktif memberikan informasi melalui media informasi</i>	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
										Program pengembangan persandian daerah	<i>Persentase informasi rahasia yang tepat waktu</i>		

										<i>Persentase informasi rahasia yang terlindungi dari kebocoran</i>	Persandian	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
									Program pengembangan data dan statistik	<i>Cakupan data dan statistik daerah yang tersedia secara akurat dan terkini</i>	Statistik	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
									Program penataan kelembagaan perangkat daerah/ Program penataan dan ketatalaksanaan pemerintahan	<i>Persentase OPD yang sesuai dengan ukuran (right sizing) dan fungsi berdasarkan analisis organisasi</i>	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
									Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah	<i>Persentase produk legislasi yang diselesaikan tepat waktu</i>	Administrasi Pemerintah	Sekretariat DPRD
									Program perencanaan pembangunan daerah	<i>Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan</i>	Perencanaan	Bappeda
									Program kajian, penelitian dan pengembangan daerah	<i>Persentase hasil kajian dan penelitian yang dimanfaatkan untuk perencanaan</i>	Perencanaan	Bappeda
									Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian dan pelaksanaan kebijakan KDH	<i>Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan</i>	Pengawasan	Inspektorat
										<i>Jumlah temuan yang bernilai uang</i>		
		Level auditor	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Program peningkatan profesioanlisme	<i>Cakupan auditor yang</i>	Pengawasan	Inspektorat

									tenaga pemeriksa dan aparaturnya	<i>kompeten</i>		
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<i>Laporan keuangan tepat waktu</i>	Keuangan	BPPKAD
									Program Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	<i>Jumlah temuan terkait pengelolaan aset daerah hasil pemeriksaan BPK</i>	Keuangan	BPPKAD
										<i>Persentase tanah milik pemerintah daerah yang bersertifikat</i>	Pertanahan	Sekretariat Daerah
		Peringkat LPPD	Peringkat 144 Seluruh Indonesia	100	80	70	60	Peringkat 50 Besar	Program peningkatan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	<i>Laporan LPPD tepat waktu</i>	Pemerintahan Umum	Setda
		Nilai LkjIP	CC	CC	CC	B	B	BB		<i>Laporan LKIP tepat waktu</i>		

**MISI V: Membangun Masyarakat Yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing**

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya akses dan kualitas pendidikan	Angka melek huruf	93,49	94,79	96,09	97,39	98,69	100,00	Program wajib belajar pendidikan 9 tahun	<i>Angka partisipasi sekolah/ APM SD</i>	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Angka rata-rata lama sekolah	7,36	7,56	7,76	7,96	8,16	8,36				
		Angka partisipasi PAUD	60,22	62,18	64,14	66,10	68,06	70,00	Program Pendidikan anak usia dini	<i>Cakupan anak bersekolah di PAUD</i>		
	Terwujudnya akses dan kualitas kesehatan	Angka usia harapan hidup	64,86	65,35	65,57	65,79	66,01	66,24	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	<i>Rasio jumlah sarana kesehatan dengan jumlah penduduk yang dilayani</i>	Kesehatan	Dinas Kesehatan

									Program promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat			Dinas Kesehatan
									Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	<i>Cakupan masyarakat miskin penerima bantuan iuran dari Pemda</i>		Dinas Kesehatan
		Persentase menurunnya balita gizi buruk	7,29	6,63	5,97	5,31	4,65	4,00	Program perbaikan gizi masyarakat	Prevalensi balita gizi buruk		Dinas Kesehatan
		Rasio kematian ibu melahirkan	79,90	72,38	64,86	57,34	49,82	42,30	Program upaya kesehatan masyarakat	<i>Jumlah kematian ibu</i>		Dinas Kesehatan
		Rasio kematian bayi	7,80	7,16	6,52	5,88	5,24	4,60		<i>Jumlah kematian bayi</i>		Dinas Kesehatan
	Terciptanya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Persentase perempuan bekerja dalam menunjang perekonomian	8,96	10,63	12,30	13,97	15,64	17,32	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase perempuan bekerja dalam menunjang perekonomian	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Penyelesaian pengaduan kasus KDRT yang tertangani (kasus)	16	16	16	16	16	16	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penyelesaian pengaduan kasus KDRT yang tertangani	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Tercapainya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah PMKS	0,01	0,21	0,41	0,61	0,81	1,00	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	<i>Persentase PMKS yang tertangani</i>	Sosial	Dinas Sosial
		Jumlah desa mandiri	0	7	15	22	29	37	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah desa mandiri	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang olahraga dan seni	Terwujudnya pencapaian prestasi olahraga dan seni	Peringkat pekan olahraga tingkat Provinsi	6	5	5	4	4	3	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Peringkat pekan olahraga tingkat Provinsi	Pendidikan dan olahraga	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi dan Nasional	32	29	25	20	18	15		Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi dan Nasional		